

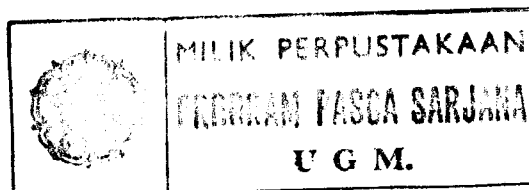
ABSTRAKSI

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan kemampuan responsif dalam sistem politik Indonesia, suatu studi perbandingan : Era Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila (ORBA).

Asumsinya adalah di Era Demokrasi Terpimpin, politik sebagai panglima dan bidang lain (ekonomi) diabaikan sehingga mematikan makna demokrasi itu. Sedangkan era Demokrasi Pancasila, Politik tidak diutamakan sebab hanya membuat malapetaka “publik” tetapi yang penting stabilitas dengan pembangunan ekonomi guna kelangsungan kehidupan negara. Selanjutnya era demokrasi terpimpin berlangsung relatif sangat cepat dengan hasil sistem politiknya hanya terfokus kepada kharisma Soekarno dan penuh hambatan.

Dari hasil penelitian kualitatif menunjukkan bahwa : sumber kekuasaan di era demokrasi terpimpin terdapat di tangan Soekarno dan militer, serta di era orde baru, di Soeharto, dimana militer sebagai elemen sistem politik utama guna mempengaruhi kondisi publik dengan stabilisasi dan juga mempengaruhi proses sampai akhirnya muncul kebijakan untuk menjawab kepentingan-kepentingan publik. Peran birokrasi sangat menentukan pula sesuai konsepsi Karl D Jackson, sejak 1957 sampai dengan sekarang model kepolitik yakni “Bureaucratic polity”. Hanya di mata pemerintahan Soekarno birokrasi sangat berpengaruh tergantung, “kader” salah satu ideologi politik sedangkan sistem pemerintahan selanjutnya : birokrasi mendominasi dalam sistem politik. Dan konsep birokrasi politik ditambah lagi apa yang dikenal oleh para pakar “personal role” lembaga kepresidenan turut menentukan segala kebijakan pada tingkat nasional maupun lokal. Peran partai, dari kedua era sistem politik Indonesia sama, tidak melaksanakan perannya secara maksimal, karena fakta subordinat presiden. Hanya tak terjadi di era Demokrasi Terpimpin, pemilihan kaparpol kehendak presiden dan hegemonik partai.

Akhirnya analisa perbandingan : Kedua era sistem politik tersebut tidak demokrasi, hanya kemampuan responsif sistem politik era demokrasi terpimpin “derajat” menanggapinya yang berbeda; lebih mendekati garis/titik batas ke era transisi demokrasi.



ABSTRACT

The aim of this research is to describing about Responsive Capability on Indonesian political system, a comparative study : The era of Guided Democracy and Democracy Pancasila (New Era).

The assumption is in era of Guided Democracy are, political as the command and alter sector (economy) will be neglected and so in finally to kill the meaning of democracy it self.

But in the Guided Democracy of Pancasila, politic is not primary, because make public accident only, but more important is stability in economic development for supporting sustainable of life of state. In the Guided Democracy are still live very fast political system focus on Soekarno's charisma.

The result of this qualitative research show that power centered in guidee democracy era hold on Soekarno and military sector and in New Era (Soeharto) when the process to make policy to give answering public interest by stabilization.

The role of bureaucracy is very important and depend by leader as apart of political ideology, and executive system. Bureaucracy is very domain in political system, and in Bureaucracy Polity concept plus "personal rule" executive institute contributing all the policies in national and regional.

The role of parties both of the era's Indonesia political; system as same as not playing maximal the role, because subordinate factor of president.

There are not building in era Guided Democracy, selecting the head of political party, the policy of president and hegemonic party. Finally, the comparative analysis : The both of era political system are not democratic, but on responsive capability the Guided Democracy System have greater degrees than Democracy of Pancasila and nearer to the limit of live in transitional democracy era.